PENGARUH UPAH MINIMUM, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDUSTRI TERHADAP PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA BARAT

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Ade Mulya Pratomo

7111414076

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Februari 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan	Pembimbing
Fafurida, S.E, M.Sc.	Andryan Setyadharma, S.E, M.Si, Ph.D.
NIP. 198502162008122004	NIP. 197901022008121003

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Maret 2019

Penguji I

Prof. Dr. P. Eko Prasetyo, SE., M.Si.
NIP. 196801022002121003

Penguji II

Karsinah, S.E., M.Si,
NIP. 197010142009122001

Penguji III

Andryan Setyadharma, S.E. M.Si, Ph.D.
NIP. 197901022008121003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Heri Yanto, MBA., PhD.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ade Mulya Pratomo
NIM	: 7111414076
Tempat Tanggal Lahir	: Banyumas, 12 Desember 1995
Alamat	: Pamijen, RT. 01/04, Sokaraja, Banyumas

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 18 Maret 2019

Ade Mulya Pratomo

NIM 7111414076

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan – (Q.S. Al Insyirah : 6)
- Kita bisa belajar lebih dari kegagalan, yaitu cara untuk terus berjuang – Morgan Wootten
- Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan – Soe Hok Gie

Persembahan

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karunianya skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua Orang Tuaku
- Guru dan Dosenku
- Almamater dan generasi penerusku

SARI

Pratomo, Ade Mulya. 2019. *"Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Industri terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D.

Kata Kunci: Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Pengangguran dan Moderator.

Industri berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan di sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor lain serta mampu mengurangi jumlah pengangguran di negara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan industri terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Variabel moderasi industri berguna untuk mengetahui apakah dengan adanya industri akan memperkuat pengaruh antar variabel tersebut.

Objek penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda dengan data panel dibantu program Eviews 9.

Hasil penelitian menunjukkan variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Variabel industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Setelah ditambahkan dengan variabel moderasi, variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.

Saran bagi pemerintah adalah agar terus memediasi penetapan upah minimum. Pemerintah diharapkan dapat mengatur regulasi yang tepat agar peningkatan jumlah industri dapat diiringi pula dengan peningkatan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi akan lebih baik bila mampu memberikan kesempatan kerja. Meningkatnya jumlah industri akan lebih baik bila diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja. Masyarakat dihimbau agar meningkatkan keterampilan agar memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh industri. Saran bagi penelitian berikutnya agar menggunakan variabel dengan metode perhitungan yang sama, dan menghindari masalah autokorelasi.

ABSTRACT

Pratomo, Ade Mulya. 2019. *"The e*ffect of Minimum Wages, Economy and Industry on Unemployment in West Java". Essay. Department of Economics Development. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Andryan Setyadharma, S.E., M.Sc., Ph.D.
Keywords: Minimum Wage, Economic Growth, Large and Medium Industries, and Unemployment.

Industry considers important in the development of a country. Development in the industrial sector will spur and lift the development of other sectors and increase the number of purchases in the country. The purpose of this study was to study the growth of minimum wages, economic growth, and industry against purchases in West Java. Industrial moderation variables are useful to find out whether there are industries that will reinforce the variables between them.

The object of this research is all districts / cities in West Java Province 2013-2015. The data used in this study is secondary data obtained from BPS in West Java. The technique of analyzing data uses multiple regression with a data panel supported by the program Eviews 9.

The results of the study show that the minimum wage variable is positive and significant for acquisition. Positive and significant economic growth variables for purchases. Industrial variables are accepted positively and significantly to the amount of acquisition. After being added to the moderating variable, the minimum wage variable has a negative and significant effect on purchases and a negative and significant economic growth variable on purchases.

The suggestion for the government is to continue to mediate the determination of minimum wages. The government is expected to increase the number of industries that can be accompanied by increasing employment opportunities. More economics will be better if needed to provide employment opportunities. The increasing number of industries will be better if accompanied by an increase in employment opportunities. The community is encouraged to improve their skills to find the criteria needed by the industry. Suggestions for further research to use variables with the same calculation method, and avoid the problem of autocorrelation.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Industri terhadap Jumlah Pengangguran di Provinsi Jawa Barat."** Skripsi ini disusun sebagai syarat akhir untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini terselesaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat serta memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dalam kelancaran perkuliahan di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., PhD., Dekan Fakultas Ekonomi yang telah membantu dalam kelancaran perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
3. Fafurida, S.E, M.Sc., Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah membantu proses akademik hingga terlaksananya penelitian ini.
4. Prof. Dr. P. Eko Prasetyo, SE., M.Si., Penguji I dalam penelitian ini yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Karsinah, S.E., M.Si, Penguji II dalam penelitian ini yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyempurnakan skripsi.

6. Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D., Dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan sampai terselesaikannya penelitian ini.
7. Bapak dan ibu, serta seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan baik secara materiil maupun non-materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2014 yang telah melangkah dan berjuang bersama dalam suasana kekeluargaan di Universitas Negeri Semarang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan yang luas kepada pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kelebihan maupun kekurangan, penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 18 Maret 2019

Ade Mulya Pratomo

7111414076

DAFTAR ISI

Daftar: **Hal.**

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KELULUSAN iii
PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
SARI vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan 10
1.4 Manfaat 10
BAB II LANDASAN TEORI 11
2.1 Industri 11
2.2 Pengangguran Terbuka 12
2.3 Upah Minimum 15
2.4 Pertumbuhan Ekonomi 16
2.5 Angkatan Kerja 18
2.6 Penelitian Terdahulu 19
2.7 Kerangka Berpikir 26
2.8 Hipotesis 27
BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1 Jenis dan Desain Penelitian 29
3.2 Variabel Penelitian 29

3.3 Definisi Operasional 30
3.4 Teknik Pengumpulan Data 31
3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 31
3.5.1 Penaksiran Model Data Panel 33
3.5.1.1 Uji Chow 33
3.5.1.2 Uji Hausman 34
3.5.2. Uji Asumsi Klasik 35
3.5.2.1 Uji Normalitas 35
3.5.2.2 Uji Heterokedastisitas 36
3.5.2.3 Uji Multikolinieritas 36
3.5.3 Uji Statistik 39
3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 39
3.5.3.2 Uji Statistik t 40
3.5.3.3 Uji Statistik F 41
3.5.4 Pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) 42
BAB IV Hasil dan Pembahasan 44
4.1 Hasil Penelitian 44
4.1.1 Gambaran Umum Industri Besar dan Sedang 44
4.1.2 Gambaran Umum Ketenagakerjaan 45
4.1.3 Gambaran Umum Upah Minimum 46
4.1.4 Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi 47
4.1.5 Analisis Regresi Data Panel Model Pertama 48
4.1.5.1 Penaksiran Model Data Panel 48
4.1.5.1.1 Uji Chow 49
4.1.5.1.2 Uji Hausman 50
4.1.5.2 Uji Asumsi Klasik 51
4.1.5.2.1 Uji Normalitas 51
4.1.5.2.2 Uji Multikolinieritas 52
4.1.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 53
4.1.6 Analisis Regresi Data Panel Model Kedua 54
4.1.6.1 Penaksiran Model Data Panel 54

4.1.6.1.1 Uji Chow 55
4.1.6.1.2 Uji Hausman 55
4.1.6.2 Uji Asumsi Klasik 56
4.1.6.2.1 Uji Normalitas 56
4.1.6.2.2 Uji Multikolinieritas 56
4.1.6.2.3 Uji Heterokedastisitas 57
4.1.7 Uji Statistik 57
4.1.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 57
4.1.7.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 59
4.1.7.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 62
4.2 Pembahasan Model Pertama 64
4.2.1 Pengaruh upah minimum terhadap jumlah pengangguran 64
4.2.2 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran 64
4.2.4 Pengaruh jumlah industri besar dan sedang terhadap Jumlah Pengangguran 65
4.3. Pembahasan Model Kedua 66
4.3.1. Pengaruh upah minimum terhadap jumlah pengangguran 66
4.3.2. Pengaruh pertumbuhan ekonomu terhadap jumlah pengangguran 66
4.3.3. Pengaruh jumlah industri besar dan sedang terhadap jumlah pengangguran 68
4.3.4. Pengaruh Upah Minimum terhadap Jumlah Pengangguran dengan dipengaruhi oleh variabel Jumlah Industri Besar dan Sedang 69
4.3.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Pengangguran dengan dipengaruhi oleh variabel Jumlah Industri Besar dan Sedang ... 70
BAB V Kesimpulan dan Saran 71
5.1 Simpulan 71
5.2 Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 79

DAFTAR TABEL

Tabel: **Hal.**

1.1 Jumlah dan Persentase Industri Besar dan Sedang di Pulau Jawa dan Luar Jawa Tahun 2001-2015 2
1.2 Upah Minimum di Pulau Jawa Tahun 2013-2017 3
1.3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang di Pulau Jawa Tahun 2013-2015 4
1.4 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016 (dalam persen) 5
1.5 Jumlah Angkatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2013-2017 (per jiwa) 7
1.6 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Penganggutan Terbuka (TPT) di Pulau Jawa Tahun 2013-2017 8
2.1 Penelitian Terdahulu 19
3.1 Jenis-jenis Variabel Moderator 42
4.1 Jumlah Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Barat 44
4.2 Pengeluaran Perusahaan untuk Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat (dalam jutaan) 46
4.3 Rasio Upah Minumum per Tahun per Individu (dalam ribuan) 47
4.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat (dalam persen) 48
4.5 Uji Chow Model Pertama 50
4.6 Uji Hausman Model Pertama 51
4.7 Uji Normalitas Model Pertama 52
4.8 Uji Multikolinieritas Model Pertama 52
4.9 Uji Heteroskedastisitas Model Pertama 53
4.10 Uji Chow Model Kedua 55
4.11 Uji Hausman Model Kedua 55
4.12 Uji Normalitas Model Kedua 56
4.13 Uji Multikolinieritas Model Kedua 56
4.14 Uji Heterokedastisitas Model Kedua 57
4.15 Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Pertama 58

4.16 Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Kedua 58
4.17 Uji Statistik Parsial Model Pertama 60
4.18 Uji Statistik Parsial Model Kedua 60
4.19 Uji Statitik F Model Pertama 63
4.20 Uji Statistik F Model Kedua 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar: **Hal.**

2.1 Kerangka Berpikir 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Industri memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara (Bappelitbangda Kabupaten Majalengka, 2010). Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa nilai keunggulan dibandingkan sektor lain. Keunggulan tersebut dikarenakan nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input produksi yang diolah (Muhtamil, 2017). Menurut Arsyad (2010), industri mampu berperan sebagai *leading sector.* Adanya pembangunan di sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya.

Berdasarkan data pada tabel 1.1, sektor industri di Indonesia terpusat berkembang di Pulau Jawa. Jumlah industri Besar dan Sedang di Pulau Jawa setiap tahunnya berjumlah lebih dari 80% dari keseluruhan jumlah industri yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketersediaan infrastruktur di Pulau Jawa yang memadai (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014). Pada tahun 2015, jumlah industri besar dan sedang di Indonesia berjumlah 26.322 industri. Jumlah industri besar dan sedang di Pulau Jawa berjumlah 21.460 industri dengan persentase 81,52%. Sementara itu jumlah industri besar dan sedang di Pulau Jawa berjumlah 4.862 industri dengan persentase sebesar 18,47%.

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Industri Besar dan Sedang di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2001-2015

Tahun	Jawa	Persentase	Luar Jawa	Persentase	Jumlah
2001	17.413 unit	81,38%	3.983 unit	18,61%	21.396
2002	17.118 unit	80,95%	4.028 unit	19,04%	21.146
2003	16.607 unit	81,71%	3.717 unit	18,28%	20.324
2004	16.901 unit	81,70%	3.784 unit	18,29%	20.685
2005	16.995 unit	81,98%	3.734 unit	18,01%	20.729
2006	24.348 unit	82,62%	5.120 unit	17,37%	29.468
2007	23.067 unit	82,38%	4.931 unit	17,61%	27.998
2008	21.207 unit	82,53%	4.487 unit	17,46%	25.694
2009	20.397 unit	83,36%	4.071 unit	16,63%	24.468
2010	19.529 unit	83,65%	3.816 unit	16,34%	23.345
2011	19.440 unit	83,18%	3.930 unit	16,81%	23.370
2012	19.554 unit	82,88%	4.038 unit	17,11%	23.592
2013	19.587 unit	82,65%	4.111 unit	17,34%	23.698
2014	20.256 unit	82,57%	4.273 unit	17,42%	24.529
2015	21.460 unit	81,52%	4.862 unit	18,47%	26.322

Sumber: BPS 2016

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jumlah industri dan penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah (Fridhowati, 2011). Penetapan tingkat upah minimum ditetapkan oleh tiap-tiap daerah, melalui dewan pengupahan (Keppres RI No.107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, 2004). Semakin tinggi upah yang dibayarkan kepada pekerja maka semakin berkurang keuntungan yang didapat para pelaku usaha. Dengan rendahnya upah minimum akan memberikan keuntungan lebih bagi para pelaku usaha. Ketika upah minimum yang diberikan tinggi, maka pekerja menjadi pihak yang dirugikan, karena telah bekerja dengan imbalan yang tidak sesuai.

Berdasarkan data pada tabel 1.2, nilai upah minimum terus meningkat. DKI Jakarta sebagai Ibukota Indonesia menduduki peringkat tertinggi. Sementara itu,

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat terendah di Pulau Jawa dalam hal upah minimum. Besarnya nilai upah minimum akan berbeda tiap daerah. Di tingkat provinsi gubernur dibantu oleh rekomendasi dewan pengupahan secara tahun rutin mengusulkan besaran upah minimum (Keppres RI No.107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, 2004).

Tabel 1.2 Upah Minimum di Pulau Jawa Tahun 2013-2017

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
DKI JAKARTA	Rp. 2.200.000	Rp. 2.441.000	Rp. 2.700.000	Rp. 3.100.000	Rp. 3.355.750
JAWA BARAT	Rp. 850.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.312.355	Rp. 1.420.624
JAWA TENGAH	Rp. 830.000	Rp. 910.000	Rp. 910.000	Rp. 1.265.000	Rp. 1.367.645
DI YOGYAKARTA	Rp. 947.114	Rp. 988.500	Rp. 988.500	Rp. 1.237.700	Rp. 1.337.645
JAWA TIMUR	Rp. 866.250	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.273.490	Rp. 1.388.000
BANTEN	Rp. 1.170.000	Rp. 1.325.000	Rp. 1.600.000	Rp. 1.784.000	Rp. 1.931.180

Sumber: BPS 2018

Menurut Mentari (2016), besarnya tingkat upah minimum juga berdampak pula dengan jumlah pengangguran di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan oleh pemerintah, berdampak pula dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di wilayah tersebut. Dengan besaran upah minimum yang rendah, para pelaku usaha akan memilih mendirikan usahanya di wilayah tersebut dengan harapan akan mendapat keuntungan lebih besar. Keuntungan tersebut didapatkan dari biaya yang dikeluarkan. Upah minimum yang rendah akan meringankan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Dengan meningkatnya jumlah industri di suatu daerah juga akan menarik minat tenaga kerja untuk datang ke daerah tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut didukung pula oleh besarnya upah minimum. Semakin tinggi upah di suatu daerah, maka akan meningkatkan minat tenaga kerja untuk bekerja di suatu unit usaha tersebut.

Berdasarkan data pada tabel 1.3, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah industri besar dan sedang terbanyak di Pulau Jawa. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah Industri Besar dan Sedang dengan jumlah lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat namun pertumbuhannya mulai meningkat bila dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Peningkatan tersebut mencapai 14 % pada tahun 2014.

Tabel 1.3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang di Pulau Jawa Tahun 2013-2015

Provinsi	Tahun			Laju Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2013-2014	2014-2015
DKI Jakarta	1.242 unit	1.240 unit	1.323 unit	-0,16%	6,7%
Jawa Barat	6.457 unit	6.633 unit	6.874 unit	2%	4%
Jawa Tengah	3.666 unit	3.851 unit	4.378 unit	5%	14%
DI Yogyakarta	322 unit	339 unit	351 unit	5%	4%
Jawa Timur	6.288 unit	6.473 unit	6.672 unit	3%	3%
Banten	1.674 unit	1.720 unit	1.862 unit	3%	8%

Sumber: Publikasi BPS 2015

Meningkatnya jumlah industri diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor lain kearah positif, dikarenakan industri merupakan *leading sector* (Arsyad, 2010). Menurut penelitian Nawawi, Ruyadi, & Komariah (2015) dengan keberadaan industri di suatu daerah akan berpengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi. Lebih lanjut Nawawi, Ruyadi, & Komariah (2015) keberadaan industri memiliki korelasi yang tinggi terhadap perubahan mata pencaharian, pendapatan, kesehatan, dan kepemilikan fasilitas hidup. Keadaan industri yang terus bertumbuh akan mendorong perluasan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat (Arsyad,

2010). Lebih lanjut dalam Arsyad (2010), perluasan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat tersebut menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data pada tabel 1.4, pertumbuhan ekonomi pada 6 provinsi di Pulau Jawa. Hingga tahun 2016 sendiri pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Pulau Jawa masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada diangka 5,03 %. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa bertumbuh dengan baik. Dengan baiknya pertumbuhan ekonomi diharapkan angka pengangguran dapat ditekan.

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016 (dalam persen)

Provinsi	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03
DKI Jakarta	6,73	6,53	6,07	5,91	5,88	5,74
Jawa Barat	6,50	6,50	6,33	5,09	5,04	5,67
Jawa Tengah	5,30	5,34	5,11	5,27	5,47	5,28
DI Yogyakarta	5,21	5,37	5,49	5,09	5,03	5,09
Jawa Timur	6.40	6.60	6.10	5.90	5.40	5.50
Banten	7.03	6.83	6.67	5.51	5.45	5.28

Sumber: BPS 2017

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mengurangi jumlah pengangguran (Sirait & Marhaeni, 2013). Lebih lanjut dalam Sirait & Marhaeni (2013), pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat menekan jumlah pengangguran apabila berorientasi pada sektor padat karya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja perekonomian (Sholihah, Syaparudin, & Nurhayani, 2017). Ekonomi suatu negara atau daerah bisa dikatakan mengalami pertumbuhan apabila kegiatan dalam perekomomian yang

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, kenaikan kapasitas produksi ini ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan nasional (Meilani, 2014). Lebih lanjut dalam Meilani (2014), pertumbuhan ekonomi yang menurun akan meningkatkan jumlah pengangguran dikarenakan turunnya penyerapan tenaga kerja. Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dilihat melalui PDRB (Prishardoyo, 2008).

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi melalui industrialisasi adalah penyediaan lapangan pekerjaan guna mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat (Rochmani, Purwaningsih, & Suryantoro, 2016). Menurut Rochmani, Purwaningsih, & Suryantoro (2016), para pelaku usaha dengan konsep usaha padat karya akan melirik daerah dengan jumlah angkatan kerja yang memadai. Berdasarkan data pada tabel 1.5, Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah terbanyak diikuti dengan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah angkatan kerja di bawah kedua provinsi tersebut dan terus meningkat tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015 yang sempat mengalami penurunan. Seluruh daerah dalam data tersebut mengalami peningkatan drastis jumlah angkatan kerja di tahun 2017. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi dengan jumlah angkatan kerja paling sedikit di Pulau Jawa.

Tabel 1.5 Jumlah Angkatan Kerja di Pulau Jawa
Tahun 2013-2017 (per jiwa)

Provinsi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	5.108.943	5.063.479	5.092.219	5.178.839	10.271.058
Jawa Barat	20.620.610	21.006.139	20.586.356	21.075.899	41.662.255
Jawa Tengah	17.524.022	17.547.026	17.298.925	17.312.466	34.611.391
D.I.Y.	1.949.243	2.023.461	1.971.463	2.099.436	4.070.899
Jawa Timur	20.432.453	20.149.998	20.274.681	19.953.846	40.228.527
Banten	5.181.796	5.338.045	5.334.843	5.587.093	10.921.936

Sumber: BPS 2018

Bertambahnya jumlah industri diharapkan menyerap tenaga kerja lebih luas (Fridhowati, 2011). Menurut Maryanti (2014) jumlah tenaga kerja dapat dihitung berdasarkan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yang tidak bekerja disebut pengangguran. Pengangguran terjadi karena jumlah angkatan kerja yang ada tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia (Mentari & Yasa, 2016).

Berdasarkan tabel 1.6, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah pengangguran tertinggi. Di Provinsi Jawa Barat terdapat dua lapangan pekerjaan utama yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran yaitu industri manufaktur dan pertanian (Mambea, Sihaloho, & Rijoly, 2017). Menurut Mambea, Sihaloho, & Rijoly (2017) disebutkan bahwa sektor industri manufaktur berperan terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Besarnya tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat mencapai 8,22 persen dengan jumlah pengangguran 1,8 juta penduduk di tahun 2017. Dengan tingkat pengangguran yang terus meningkat tersebut, menunjukkan banyaknya sektor industri tidak mampu mencukupi kebutuhan lapangan pekerjaan di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.6 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa Tahun 2013-2017

Provinsi	Tahun									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Pengangguran	TPT	Pengangguran	TPT	Pengangguran	TPT	Pengangguran	TPT	Pengangguran	TPT
DKI Jakarta	440.704 jiwa	8,63 %	429.110 jiwa	8,47 %	368.190 jiwa	7,23 %	317.007 jiwa	6,12 %	346.945 jiwa	7,14 %
Jawa Barat	1.888.667 jiwa	9,16 %	1.775.196 jiwa	8,45 %	1.794.874 jiwa	8,72 %	1.873.861 jiwa	8,89 %	1.839.428 jiwa	8,22 %
Jawa Tengah	1.054.062 jiwa	6,01 %	996.344 jiwa	5,68 %	863.783 jiwa	4,99 %	801.330 jiwa	4,63 %	823.938 jiwa	4,57 %
D I Y	63.172 jiwa	3,24 %	67.418 jiwa	3,33 %	80.245 jiwa	4,07 %	57.036 jiwa	2,72 %	64.019 jiwa	3,02 %
Jawa Timur	878.543 jiwa	4,30 %	843.490 jiwa	4,19 %	906.904 jiwa	4,47 %	839.283 jiwa	4,21 %	838.496 jiwa	4 %
Banten	494.170 jiwa	9,54 %	484.053 jiwa	9,07 %	509.383 jiwa	9,55 %	498.596 jiwa	8,92 %	519.563 jiwa	9,28 %

Sumber: BPS 2018

Indonesia memusatkan sektor industrinya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri jumlah industri besar dan sedang terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat. Banyaknya jumlah industri besar dan sedang tersebut menciptakan kebijakan yang mengatur besaran upah minimum agar tercipta keseimbangan antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Besaran upah minimum di Provinsi Jawa Barat juga terus meningkat setiap tahunnya. Dengan banyaknya jumlah industri besar dan sedang yang terus bertambah, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat justru mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan jumlah industri tersebut bersamaan pula dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut menyebabkan bertambah pula jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, dikarenakan angkatan kerja tersebut tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH UPAH MINIMUM, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDUSTRI TERHADAP PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA BARAT".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disusun pertanyaan penilitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, jumlah industri terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat?

2. Bagaimana pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat dengan adanya peningkatan jumlah industri?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan jumlah industri terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh upah minimum dan pertumbuhan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat dengan adanya peningkatan jumlah industri.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait industri dan pengangguran di Provinsi Jawa Barat
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Industri Besar dan Sedang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, definisi dari industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri menurut jumlah tenaga kerja dikelompokkan menjadi:

1. Industri Rumah Tangga, merupakan industri dengan jumlah karyawan / tenaga kerjanya berjumlah 1 - 4 orang
2. Industri Kecil, merupakan industri dengan jumlah karyawan / tenaga kerjanya berjumlah 5 - 19 orang
3. Industri Sedang atau industri menengah, merupakan industri dengan jumlah karyawan / tenaga kerjanya berjumlah 20 - 99 orang
4. Industri Besar, merupakan industri dengan jumlah karyawan / tenaga kerjanya berjumlah 100 orang atau lebih

Lebih lanjut dalam Arsyad (2010), dari segi kesempatan kerja yang diciptakan maka industri kecil merupakan industri yang paling penting peranannya. Dari segi nilai kontribusi terhadap PDB maka industri besarlah yang paling menonjol peranannya. Jika dilihat dari sifat investasinya, sebagian besar industri kecil bersifat padat karya, sedangkan industri besar cenderung bersifat padat modal.

Daya tarik suatu daerah dalam menjadi pusat pertumbuhan industri antara lain (Arsyad, 2010):

1. Kondisi prasarana. Kondisi prasarana menentukan efisiensi industri. Selama belum tersedia prasarana yang memadai, akan sangat sulit bagi industri di daerah yang bersangkutan untuk dapat maju dan berkembang.
2. Kondisi pasar. Industri dapar dibedakan ke dalam tiga golongan berikut:
    a. Industri yang dekat dengan bahan baku, misalnya industri makanan atau jenis-jenis industri yang mengolah hasil pertanian. Dalam hal ini, menarik tidaknya suatu daerah ditentukan oleh ketersediaan bahan mentah yang dibutuhkan industri di daerah tersebut.
    b. Industri yang dekat dengan pasar, misalnya industri bahan makanan yang tidak tahan lama dan jasa. Kedekatan geografis dengan pasar merupakan hal yang menarik dalam pendirian industri.
    c. Industri yang lokasinya netral, umumnya terdiri dari industri pengolahan di mana efisiensinya tidak tergantung yang terdapat di daerah tersebut.

2.2. Pengangguran Terbuka

Menurut Prasetyo (2009) pengangguran terbuka adalah individu yang sebenarnya mampu bekerja dan sedang mencari pekerjaan, namun mereka tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran rata-rata dalam perekonomian yang berfluktuasi (Mankiw, 2007). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka terdiri dari:

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum memulai bekerja.

Setiap individu bisa menjadi pengangguran akibat beberapa alasan berikut (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004):

1. Individu tersebut baru saja masuk dalam angkatan kerja, orang yang baru mencari pekerjaan, atau orang yang baru kembali mencari pekerjaan setelah tidak mencari pekerjaan selama lebih dari 4 minggu
2. Orang yang keluar dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan baru dan terdaftar sebagai pengangguran ketika sedang mencari pekerjaan
3. Orang yang mungkin diberhentikan sementara, yaitu ketika terjadi pengangguhan kerja tanpa diupah lebih dari 7 hari, dilakukan oleh pemberi kerja.
4. Para pekerja yang kehilangan pekerjaan, baik karena dipecat maupun karena perusahaan tempat dia bekerja bangkrut.

Berdasarkan sumbernya, pengangguran dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu friksional, struktural, musiman dan siklikal (McEachern, 2000).

1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang muncul karena adanya waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan antara kualifikasi pekerja dengan pekerjaan yang tersedia.

2. Pengangguran strukutural adalah pengangguran yang muncul karena keterampilan yang diminta tidak sesuai dengan keterampilan penganggur, atau penganggur tidak berlokasi sama dengan pekerjaan.
3. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja musiman.
4. Pengangguran siklikal adalah fluktuasi pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis.

Lebih dalam mengenai pengangguran dikenal istilah *full employment* yang merupakan tingkat produksi suatu perekonomian pada saat tidak ada pengangguran siklikal (McEachern, 2000). Lebih lanjut dalam McEachern (2000), dalam perekonomian yang sehat sekalipun, akan tetap ada pengangguran friksional, struktural dan musiman. Kondisi ini menunjukkan ketika *full employment* tidak berarti tidak ada pengangguran, namun tingkat pengangguran relatif rendah yaitu 4 sampai 6 persen.

Menurut Samuelson & Nordhaus (2004), pengangguran yang tinggi termasuk ke dalam masalah ekonomi dan sosial. Lebih lanjut dalam Samuelson & Nordhaus (2004), pengangguran merupakan masalah ekonomi karena hal tersebut menyianyiakan sumber daya yang berharga. Pengangguran juga merupakan masalah sosial karena mengakibatkan penderitaan besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang.

2.3. Upah Minimum

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lebih lanjut dalam PP Nomor 78 Tahun 2015, kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh.

Kebijakan pengupahan sebagaimana dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 antara lain:

a. Upah minimum
b. Upah kerja lembur
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
f. Bentuk dan cara pembayaran upah
g. Denda dan potongan upah
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
j. Upah untuk pembayaran pesangon
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting untuk mengatur keberhasilan pembangunan suatu negara (Arsyad, 2010). Menurut Arsyad (2010) dijelaskan lebih lanjut bahwa pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa melihat perubahan pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi ataupun perbaikan struktur kelembagaan.

Menurut Samuelson & Nordhaus (2004). faktor pertumbuhan ekonomi antara lain:

- Sumber daya manusia (penawaran tenaga kerja, pendidikan, disiplin, motivasi)
- Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, kualitas lingkungan)
- Pembentukan modal (mesin, pabrik, jalan)
- Teknologi (sains, rekayasa, manajemen, kewirausahaan)

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki kaitan yang erat (Arsyad, 2010). Menurut Arsyad (2010) pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan sebuah skema pengurangan angka pengangguran. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan menciptakan pertumbuhan output, sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengejar kapasitas output yang meningkat tersebut. Hukum Okun menyatakan bahwa 1 poin tambahan pengangguran membebani 2 persen PDB (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004).

Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan pertumbuhan input (Prasetyo, 2009), seperti:

(i) Modal manusia (*human capital*) seperti tenaga kerja, pendidikan, disiplin, dan motivasi.

(ii) Modal alam (*natural capital*) seperti tanah, mineral, minyak, bahan bakar, dan kualitas lingkungan alam.

(iii) Pembentukan modal (*built capital*) seperti mesin, industri, jalan, infrastruktur lainnya, modal kredit, teknologi, dan modal barang.

(iv) Modal sosial masyarakat (*social capital*) seperti gotong-royong dan kesetiakawanan.

Berdasarkan konten analisis ekonomi makro ekonomi, kegunaan istilah pertumbuhan ekonomi mempunyai dua segi pengertian yang berbeda (Prasetyo, 2009). Lebih lanjut dalam Prasetyo (2009) istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mendeskripsikan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi untuk mencapai taraf kemakmuran yang lebih baik atau lebih tinggi. Di lain pihak, istilah pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara yang dapat dibedakan menjadi (Prasetyo, 2009):

1. Masalah pertumbuhan ekonomi itu bersumber dari perbedaan di antara pertumbuhan potensial yang dapat dicapai, dan tingkat pertumbuhan yang sebenarnya tercapai
2. Masalah pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan potensial pertumbuhan itu sendiri

3. Masalah pertumbuhan ekonomi adalah mengenai keteguhan pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya.

2.5. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah jumlah orang yang sedang bekerja dan orang yang menganggur (Mankiw, 2007). Menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas baik yang bekerja, memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Menurut Heru (2015), banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikkan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi populasi dewasa yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja (McEachern, 2000). Lebih lanjut dalam McEachern (2000), mereka yang sedang mencari kerja disebut dengan pengangguran.

Produktivitas perekonomian bergantung kepada proporsi orang dewasa yang masuk dalam angkatan kerja, atau disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (McEachern, 2000). Menurut McEachern (2000), tingkat partisipasi angkatan kerja adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan populasi dewasa. Sedangkan tingkat pengangguran merupakan jumlah penganggur sebagai persentase dari angkatan kerja.

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama penulis & judul penelitian	Variabel & Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti, dan Ni Luh Karmini (2014) "Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dam Upah Minmum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali"	Variabel yang digunakan: • Tingkat inflasi • Pertumbuhan ekonomi • Upah minimum Alat Analisis yang digunakan adalah regresi berganda.	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, tingkat inflasi dan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. • Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat variabel yang sama yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan upah minimum, serta variabel

No.	Nama penulis & judul penelitian	Variabel & Alat Analisis	Hasil Penelitian
			dependen yang digunakan adalah pengangguran terbuka. • Perbedaan dengan penelitian ini adalah data yang digunakan merupakan data *time series* sementara peneleitian ini menggunakan data panel. Objek yang diteliti adalah Provinsi Bali namun hasil yang didapat cenderung sama.
2.	Kristiyana (2011) "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2004-2009"	Variabel yang digunakan: • Tingkat inflasi • Pertumbuhan ekonomi • Upah minimum Alat Analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda.	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial variabel upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.

No.	Nama penulis & judul penelitian	Variabel & Alat Analisis	Hasil Penelitian
			Sedangkan variabel inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. • Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat variabel independen yang sama yaitu upah minimum dan pertumbuhan ekonomi dan variabel dependen yaitu pengangguran terbuka. Data yang digunakan sama dengan penelitian ini yaitu data panel. • Perbedaan dengan penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu Provinsi Jawa Tengah dan hasil yang didapat dari penelitian cenderung berbeda.
3.	Aam Latifah Pauziah Rohmah (2018)	Variabel yang digunakan:	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan

No.	Nama penulis & judul penelitian	Variabel & Alat Analisis	Hasil Penelitian
	"Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Investasi Swasta, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat"	• Jumlah Angkatan Kerja • Pendidikan • Investasi Swasta • Pengeluaran Pemerintah Alat Analisis yang digunakan adalah regresi berganda.	seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel angkatan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh secara nagatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Sementara itu variabel pendidikan dan investasi swasta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terbuka. • Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat variabel independen junlah angkatan kerja yang berpengaruh

No.	Nama penulis & judul penelitian	Variabel & Alat Analisis	Hasil Penelitian
			terhadap perubahan jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. • Perbedaan dengan penelitian ini adalah pengaruh dari perubahan jumlah angkatan kerja berbeda dengan penelitian ini.
4.	Pandelis Mitsis (2015) "*Effects of Minimum Wage on Total Employment: Evidence from Cyprus.*"	Variabel yang digunakan: • Upah Minimum • Jumlah Pekerjaan Alat analisis yang digunakan adalah *Vector Autoregression* (VAR).	• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap jumlah pekerjaan yang tersedia. Penelitian ini dilakukan di negara Cyprus. • Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat variabel independen upah minimum • Perbedaan dari penelitian ini adalah pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya

No.	Nama penulis & judul penelitian	Variabel & Alat Analisis	Hasil Penelitian
			perubahan besaran upah minimum. Alat analisis yang digunakan adalah VAR (*Vector Autoregression*).
5.	Sara Lemos (2007) "*Minimum Wage Effects on Wages, Emploment and Prices in Brazil*"	Variabel yang digunakan: • Upah Minimum • Jumlah Pekerjaan • Tingkat Harga Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi menggunakan data panel.	• Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh hubungan antara upah minimum, pekerjaan yang tersedia dan tingkat harga. Data yang digunakan adalah data panel bulanan di Brazil dari tahun 1982-2000. Setiap peningkatan sebesar 10% pada upah minimum akan mengurangi pekerjaan yang tersedia sebesar 0.2% dan meningkatkan tingkat harga sebesar 0.8%. • Persamaan dengan penelitian ini terletak pada alat analisis

No.	Nama penulis & judul penelitian	Variabel & Alat Analisis	Hasil Penelitian
			yang digunakan, yaitu regresi menggunakan data panel. • Perbedaan dari penelitian ini adalah pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya perubahan besaran upah minimum.
6.	Jing Wang, dan Marley Gunderson (2011) "*Minimum Wage Effects in Employment and Wages: dif-in-dif Estimates from Eastern China.*"	Variabel yang digunakan: • Upah Minimum • Jumlah Pekerjaan • Upah yang diberikan Alat analisis yang digunakan adalah dif-in-dif estimates.	• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan upah minimum tidak mempengaruhi ketersediaan pekerjaan di China. Upah minimum tidak memberikan dampak terhadap upah yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya. China sendiri tidak menekankan kebijakan upah minimumnya agar diterapkan oleh perusahaan.

No.	Nama penulis & judul penelitian	Variabel & Alat Analisis	Hasil Penelitian
			• Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari variabel independen upah minimum. • Perbedaan dari penelitian ini adalah pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya perubahan besaran upah minimum.

2.7. Kerangka Berpikir

Berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

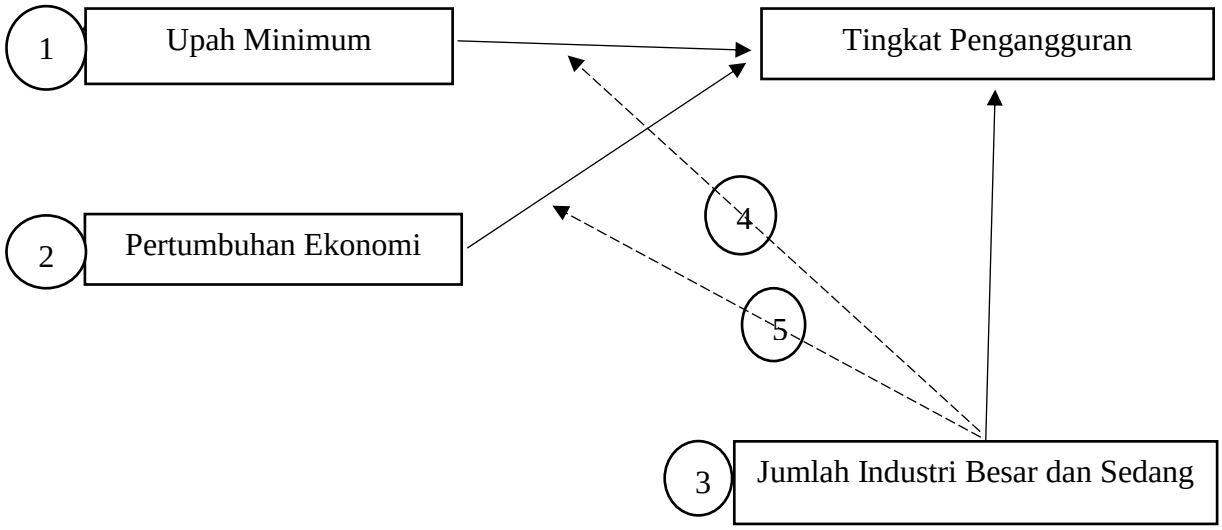

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

1. Variabel upah minimum berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.
3. Variabel jumlah industri besar dan sedang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.
4. Variabel upah minimum setelah dipengaruhi jumlah industri besar dan sedang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.
5. Variabel pertumbuhan ekonomi setelah dipengaruhi jumlah industri besar dan sedang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

2.8. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya (Narbuko & Achmadi, 2013). Lebih lanjut dalam Narbuko & Achmadi (2013), hipotesis dapat diterima dan dapat pula ditolak. Hipotesis diterima apabila bahan-bahan dari penelitian membenarkan kenyataan dan dapat ditolak apabila menyangkal dari kenyataan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. H_0 = Diduga upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

Ha = Diduga upah minimum berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

2. H_0 = Diduga pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

   Ha = Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

3. H_0 = Diduga jumlah industri besar dan sedang tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

   Ha = Diduga jumlah industri besar dan sedang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

4. H_0 = Diduga upah minimum setelah dipengaruhi jumlah industri besar dan sedang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

   Ha = Diduga upah minimum setelah dipengaruhi jumlah industri besar dan sedang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

5. H_0 = Diduga pertumbuhan ekonomi setelah dipengaruhi jumlah industri besar dan sedang tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

   Ha = Diduga pertumbuhan ekonomi setelah dipengaruhi jumlah industri besar dan sedang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Fenomena ini terjadi ketika perusahaan memilih mengurangi jumlah karyawan dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk gaji meningkat. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Variabel industri besar dan sedang berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah industri besar dan sedang lebih menekankan pada peningkatan output produksi dan lebih berorientasi padat modal.
2. Pada variabel yang telah dipengaruhi variabel moderasi, variabel upah menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Ketika tingkat upah meningkat maka individu akan lebih mudah memilih pekerjaan yang ada. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah industri besar dan sedang melemahkan teori yang ada. Variabel pertumbuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi jumlah pengangguran.

Penambahan variabel moderator terbukti dapat memperbaiki model sebelumnya menjadi lebih baik, dengan berubahnya nilai probabilitas variabel upah minimum dan variabel pertumbuhan ekonomi yang dalam model sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus tetap berperan aktif terhadap penetapan upah minimum dan mengawasi penerapannya pada industri besar dan sedang agar penerapan kebijakan penetapan upah minimum bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada, namun tidak memberatkan pelaku usaha atas besaran upah minimum yang diberikan. Pelaku usaha diharuskan membayar diatas dari upah minimum yang diterapkan. Sementara itu, angkatan kerja diharapkan bisa menerima upah minimum yang telah ditetapkan agar tercapai keseimbangan upah minimum. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga bukan berarti pengangguran akan menurun. Untuk itu akan lebih baik jika pertumbuhan ekonomi bisa memberikan kesempatan kerja yang lebih dibandingkan hanya terpusat pada sektor padat modal maupun hanya berasal dari kegiatan konsumtif.
2. Meningkatnya jumlah industri akan lebih baik bila diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja. Pemerintah diharapkan mampu mengatur regulasi yang tepat agar angkatan kerja mampu terserap ke dalam sektor industri sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Masyarakat juga

dihimbau agar meningkatkan keterampilan agar memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan yang ada.

3. Penelitian ini penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki perbedaan metode perhitungan yaitu menggunakan persentase dari perubahan nilai pdrb antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Penelitian selanjutnya dapat dipilih kembali variabel dengan metode perhitungan yang seragam. Penelitian ini memiliki masalah autokorelasi yang akan lebih baik bila masalah autokorelasi bisa dihilangkan sehingga bisa dapat dipastikan model tersebut tidak bias.

DAFTAR PUSTAKA

Andita, F., & Soesatyo, Y. (2014). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan melalui Industri Formal di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 2, No.3*, 1-17.

Anggoro, M. H., & Soesatyo, Y. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.3 , No.3*, 1-13.

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (5 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Azizah, F. I. (2016). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi, terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014.* Yogyakarta: Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka. (2010). *Data Sektoral Kabupaten Majalengka 2010.* Majalengka: Bappelitbangda.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. (2014). *Pengembangan Industri Garmen.* Semarang: DISPERINDAG Provinsi Jateng.

Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2004). *Makroekonomi.* Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Fridhowati, N. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri.* Bogor: Skripsi.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multi Variate dengan Program IBM SPSS 19.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8.* Semarang: Badan Penerbit - Undip.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Dasar-dasar Ekonometrika.* Jakarta: Salemba Empat.

Gunawan, A. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Curvanomic, Vol. 6, No. 2*.

Heryawan, A., Fauzi Akhmad, & Hidayat, A. (2014). Analisis Ekonomi dan Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat. *Journal of Agriculture, Resource, and Environmental Economics, Vol.1 , No.2*, 1-11.

Keppres RI No.107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. (2004).

Kristiyana. (2011). *Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2004-2009.* Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Kuntiarti, D. D. (2018). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Kenaikan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 7, No.1*, 1-9.

Lemos, S. (2007). Minimum Wage Effects on Wages, Employment and Prices in Brazil. *Research in Labor Economic, Vol. 26*, 397-413.

Mambea, I. Y., Sihaloho, E. D., & Rijoly, J. C. (2017). Analisis Tingkat Pengangguran di 25 Kabupaten Kota di Jawa Barat 2006-2009. *Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran*.

Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi.* Jakarta: Erlangga.

Maryanti, S., & Liviawati. (2014). Hubungan Perencanaan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru Tahun 2008 S.D 2012. *Pekbis Jurnal, Vol.6, No.2*, 134-144.

McEachern, W. A. (2000). *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Meilani, S. (2014). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Magelang dengan Metode Analisis Hierarki Proses (AHP). *Economic Development Analysis Journal, Vol. 3, No.1*, 14-24.

Mentari, N. W., & Yasa, I. M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah terhadap Tingkat Pengangguran melalui Jumlah Investasi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 5, No.6*, 692-712.

Misbahhudin, & Hasan, I. (2014). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik.* Jakarta: Bumi Aksara.

Mitsis, P. (2015). Effects of Minimum Wages on Total Employment: Evidence from Cyprus. *J Labor Res*.

Muhadi, A. (1997). Relevansi Adopsi Manajemen Jepang dalam Kerangka Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industrialisasi di Indonesia Pendekatan Proses dan Keterkaitan Ekonomi. *JEP, 2. No.2*, 159-167.

Muhtamil. (2017). Pengaruh Perkembangan Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol.4, No. 3*, 199-206.

Narbuko, D., & Achmadi, D. (2013). *Metodologi Penelitian* (13th ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nawawi, I., Ruyadi, Y., & Komariah, S. (2015). Pengaruh Keberadaan Industri terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Lagadar Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. *Jurnal Sosietas, Vol.5, No. 2*.

Nugrahaeny, A., & Dewi, R. M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), Vol. 4, No.3 Edisi Yudisium*, 1-8.

Nurmawati, N. (2017). Kondisi Ketenagakerjaan Di Jawa Barat Dan MEA. *Prosiding KS: Riset & PKM, Vol.4, No.1*, 110-114.

Ollyviana, S. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja yang Bekerja, Tamatan SLTA dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 2014. *UNNES Journal of Mathematics*.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN. (t.thn.).

Prasetyo, P. E. (2009). *Fundamental Makroekonomi.* Yogyakarta: Beta Offset.

Prishardoyo, B. (2008). Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, Vol.1, No.1*, 1-9.

Purwasih, H., & Soesatyo, Y. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo. *Yudisium, Vol.5, No. 1 Edisi Yudisium*, 1-6.

Rimbawan, N. D. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja (Kasus Provinsi Bali, 2001-2011). *Piramida, V0l.8, No.2*, 76-84.

Rochmani, T. S., Purwaningsih, Y., & Suryantoro, A. (2016). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah. *JIEP, Vol.16, No.2*, 50-61.

Rohmah, A. P. (2018). *Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Investasi Swasta, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Safitri, D. S. (2011). *Pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009.* Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu Makroekonomi, Edisi 17.* Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi 5 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Saputra, B. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Kemiskinan dan Pendidikan terhadap Pengangguran di Sumatera Barat. *Jurnal Fakultas Ekonomi, 13, No.3*.

Sholeh, M. (2007). Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori serta Beberapa Potretnya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol.4, No.1*, 62-75.

Sholihah, I. M., Syaparudin, & Nurhayani. (2017). Analisis investasi sektor industi manufaktur, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol.12. No.01*, 11-24.

Sirait, N., & Marhaeni, A. (2013). Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud, Vol.2, No.2*, 108-118.

Syam, S., & Wahab, A. (2015). Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar. *Iqtisaduna, Vol.1, No. 1*, 35-54.

Tirta, A. S. (2013). *Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.* Skripsi: Universitas Negeri Semarang.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Wang, J., & Gunderson, M. (2012). Minimum Wage Effects on Employment and Wages: dif-in-dif Estimates from Eastern China. *International Journal of Manpower, Vol.33, No.8*, 860-876.

Wijayanti, N. A., & Karmini, N. L. (2014). Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol.3, No.10*, 460-466.

Zilfiyah, S., & Pratomo, D. S. (2013). Analisis Kontribusi Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol.1, No.2*.

Zulaili. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. 1-9.